

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020**

Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020

Jl. Pemuda, Siko, Ternate

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Ternate, 31 Desember 2020
Kepala Balai,

Ir. Yusup Patiroy, MM
NIP. NIP.196606051993031004

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Tanah

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

C.1.3. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

- E.1. Ekuitas Awal
- E.2. Surplus/Defisit-LO
- E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
- E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
- E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ternate, 31 Desember 2020
Kepala Balai,

Ir. Yusup Patiroy, MM
NIP. NIP.196606051993031004

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp402.499.848,00 atau mencapai 221,74% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp181.520.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp12.233.043.020,00 atau mencapai 99,91% dari alokasi anggaran sebesar Rp12.244.430.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp31.271.003.237,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp485.404.832,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp30.785.598.405,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp30.211.804,00 dan Rp31.240.791.433,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp392.655.454,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp11.459.180.889,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-11.066.525.435,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp168.061.740,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-10.898.463.695,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp30.254.335.050,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-10.898.463.695,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp372.406,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp11.884.547.672,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp31.240.791.433,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TERNATE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020			31 Desember 2019
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	181.520.000,00	402.499.848,00	221,74	451.373.690,00
Jumlah Pendapatan		181.520.000,00	402.499.848,00	221,74	451.373.690,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	3.454.093.000,00	3.449.735.020,00	99,87	3.439.743.386,00
Belanja Barang	B.4.	6.561.892.000,00	6.556.255.000,00	99,91	5.204.840.559,00
Belanja Modal	B.5.	2.228.445.000,00	2.227.053.000,00	99,94	1.069.784.000,00
Jumlah Belanja		12.244.430.000,00	12.233.043.020,00	99,91	9.714.367.945,00

II. NERACA

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TERNATE
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.	0,00	626.224,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	0,00	-3.131,00
Persediaan	C.1.3.	485.404.832,00	339.278.093,00
Jumlah Aset Lancar		485.404.832,00	339.901.186,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	10.675.417.000,00	10.675.417.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	9.656.781.603,00	8.161.119.773,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	18.451.897.060,00	17.684.289.060,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	200.652.000,00	200.652.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	18.900.000,00	18.900.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-8.218.049.258,00	-6.771.034.469,00
Jumlah Aset Tetap		30.785.598.405,00	29.969.343.364,00
Jumlah Aset		31.271.003.237,00	30.309.244.550,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	30.211.804,00	54.909.500,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		30.211.804,00	54.909.500,00
Jumlah Kewajiban		30.211.804,00	54.909.500,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	31.240.791.433,00	30.254.335.050,00
Jumlah Ekuitas		31.240.791.433,00	30.254.335.050,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		31.271.003.237,00	30.309.244.550,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TERNATE
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	392.655.454,00	381.264.353,00
JUMLAH PENDAPATAN		392.655.454,00	381.264.353,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	3.424.109.020,00	3.465.369.386,00
Beban Persediaan	D.3.	635.842.001,00	556.770.891,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	3.154.345.604,00	2.814.375.500,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	914.339.550,00	719.297.050,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.888.066.150,00	1.301.743.259,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	1.442.481.695,00	1.394.934.566,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	-3.131,00	-18.547,00
JUMLAH BEBAN		11.459.180.889,00	10.252.472.105,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-11.066.525.435,00	-9.871.207.752,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0,00	66.400.000,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	200.823.700,00	76.210.525,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	32.761.960,00	40.723.347,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		168.061.740,00	101.887.178,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-10.898.463.695,00	-9.769.320.574,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TERNATE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS AWAL	E.1.	30.254.335.050,00	30.743.842.119,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-10.898.463.695,00	-9.769.320.574,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	372.406,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.1.	372.406,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	11.884.547.672,00	9.279.813.505,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	31.240.791.433,00	30.254.335.050,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate

Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Karantina Pertanian di bawah Kementerian Pertanian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Karantina Pertanian berperan dalam pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate merupakan penggabungan dari dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Karantina Pertanian, yaitu Stasiun Karantina Hewan Kelas II Ternate dan Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas II Ternate. Sejak tanggal 3 April 2008, kedua UPT tersebut bergabung dengan nama Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate berdasarkan Permentan Nomor: 22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 03 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian. Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate berkedudukan di Ternate, Provinsi Maluku Utara.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	170.360.000,00	170.360.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	11.160.000,00	11.160.000,00
Jumlah Pendapatan	181.520.000,00	181.520.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.440.680.000,00	2.359.917.000,00
Belanja Lembur	1.001.660.000,00	1.094.176.000,00
Belanja Barang Operasional	1.960.608.000,00	2.013.528.000,00
Belanja Barang Non Operasional	629.100.000,00	568.140.000,00
Belanja Barang Persediaan	578.792.000,00	600.432.000,00
Belanja Jasa	698.700.000,00	575.790.000,00
Belanja Pemeliharaan	914.340.000,00	914.340.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.692.980.000,00	1.889.662.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.542.414.000,00	1.459.445.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	769.000.000,00	769.000.000,00
Jumlah Belanja	13.228.274.000,00	12.244.430.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp402.499.848,00 atau mencapai 221,74% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp181.520.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Jasa Lainnya	11.160.000,00	46.310.000,00	414,96
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	170.360.000,00	346.971.678,00	203,67
Pendapatan Lain-lain	0,00	9.218.170,00	0,00

Jumlah	181.520.000,00	402.499.848,00	221,74
---------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Realisasi Pendapatan TA 2020 mengalami penurunan sebesar -10,83% dibandingkan TA 2019. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	66.400.000,00	- 100,00
Pendapatan Denda	0,00	6.641.580,00	- 100,00
Pendapatan Jasa Lainnya	46.310.000,00	36.270.000,00	27,68
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	346.971.678,00	342.062.110,00	1,44
Pendapatan Lain-lain	9.218.170,00	0,00	0,00
Jumlah	402.499.848,00	451.373.690,00	-10,83

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp12.233.043.020,00 atau 99,91% dari anggaran belanja sebesar Rp12.244.430.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2020

Uraian	2020		
Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	3.454.093.000,00	3.452.836.061,00	99,96
Belanja Barang	6.561.892.000,00	6.556.255.000,00	99,91
Belanja Modal	2.228.445.000,00	2.227.053.000,00	99,94
Total Belanja Kotor	12.244.430.000,00	12.236.144.061,00	99,93
Pengembalian Belanja		-3.101.041,00	0,00
Total Belanja	12.244.430.000,00	12.233.043.020,00	99,91

Dibandingkan dengan Tahun 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 25,93% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pagu anggaran belanja di tahun 2020 lebih besar dibandingkan tahun 2019.
2. Di tahun 2020, Adanya kenaikan pangkat pegawai dalam jabatan fungsional sebanyak 7 orang pegawai dan kenaikan gaji berkala sebanyak 6 orang.
3. Meningkatnya frekuensi kegiatan operasional tindak karantina, dikarenakan adanya pintu pemasukan dan pengeluaran baru yang sebelumnya belum ditetapkan, yakni Pelabuhan Laut Jailolo dan Pelabuhan Laut Weda. Sehingga wilayah tersebut harus di lakukan pengawasan dan tindak karantina lainnya. Sehingga petugas dari wilayah Ternate harus ditugaskan ke wilayah tersebut untuk menunjang tindak karantina.
4. Adanya kegiatan Pembangunan Gudang Tertutup, Pembangunan Pagar Permanen Wilker Sanana, Pemasangan Paving Blok Mess Facei.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Belanja Pegawai	3.449.735.020,00	3.439.743.386,00	0,29
Belanja Barang	6.556.255.000,00	5.204.840.559,00	25,96
Belanja Modal	2.227.053.000,00	1.069.784.000,00	108,18
Total Belanja	12.233.043.020,00	9.714.367.945,00	25,93

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.449.735.020,00 dan Rp3.439.743.386,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,29% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Di tahun 2020, adanya kenaikan pangkat pegawai dalam jabatan fungsional sebanyak 7 orang pegawai dan kenaikan gaji berkala sebanyak 6 orang.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.358.665.061,00	2.346.093.804,00	0,54
Belanja Lembur	1.094.171.000,00	1.095.273.000,00	-0,10
Jumlah Belanja Kotor	3.452.836.061,00	3.441.366.804,00	0,33

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Pengembalian Belanja Pegawai	-3.101.041,00	-1.623.418,00	91,02
Jumlah Belanja	3.449.735.020,00	3.439.743.386,00	0,29

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.556.255.000,00 dan Rp5.204.840.559,00. Realisasi belanja barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 25,96% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Meningkatnya frekuensi kegiatan operasional tindak karantina, dikarenakan adanya pintu pemasukan dan pengeluaran baru yang sebelumnya belum ditetapkan, yakni Pelabuhan Laut Jailolo dan Pelabuhan Laut Weda. Sehingga wilayah tersebut harus dilakukan pengawasan dan tindak karantina lainnya. Sehingga petugas dari wilayah Ternate harus ditugaskan ke wilayah tersebut untuk menunjang tindak karantina.
2. Adanya pemeliharaan gedung kantor bertingkat, gedung laboratorium, gedung kantor wilker dan halaman kantor.
3. Tahun 2020, terdapat fasilitas gelar perkara yakni tindak pidana bagi tersangka pembawa unggas dewasa yang telah di larang pemasukannya ke Maluku Utara.

Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.013.528.000,00	1.716.906.000,00	17,28
Belanja Barang Non Operasional	567.178.750,00	489.964.000,00	15,76
Belanja Barang Persediaan	600.432.000,00	351.668.000,00	70,74
Belanja Jasa	572.710.550,00	625.262.250,00	-8,40
Belanja Pemeliharaan	914.339.550,00	719.297.050,00	27,12
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.888.066.150,00	1.301.743.259,00	45,04
Jumlah Belanja Kotor	6.556.255.000,00	5.204.840.559,00	25,96
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	6.556.255.000,00	5.204.840.559,00	25,96

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.227.053.000,00 dan Rp1.069.784.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja

modal pada TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 108,18% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran belanja modal di tahun 2020 berupa pengadaan aset gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin lebih banyak di bandingkan dengan tahun 2019.
2. Pengadaan aset Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Gudang Tertutup, Pembangunan Pagar Permanen Wilker Sanana, Pemasangan Paving Blok Mess Facei.
3. Pengadaan aset Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan Meubel Air, Alat Laboratorium, Alat Pengolah Data, Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2, Alat Komunikasi dan Fasilitas Kantor Lainnya

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Tanah	0,00	49.960.000,00	-100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.459.445.000,00	969.879.000,00	50,48
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	767.608.000,00	49.945.000,00	1.436,91
Jumlah Belanja Kotor	2.227.053.000,00	1.069.784.000,00	108,18
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	2.227.053.000,00	1.069.784.000,00	108,18

B.5.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.459.445.000,00 dan Rp969.879.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 50,48% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Pengadaan aset Peralatan dan Mesin di Tahun 2020 berupa Pengadaan Meubel Air, Alat Laboratorium, Alat Pengolah Data, Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2, Alat Komunikasi dan Fasilitas Kantor Lainnya

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.459.445.000,00	969.879.000,00	50,48
Jumlah Belanja Kotor	1.459.445.000,00	969.879.000,00	50,48
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.459.445.000,00	969.879.000,00	50,48

B.5.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp767.608.000,00 dan Rp49.945.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 1.436,91% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Pengadaan aset Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Gudang Tertutup, Pembangunan Pagar Permanen Wilker Sanana, Pemasangan Paving Blok Mess Facei.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	767.608.000,00	49.945.000,00	1.436,91
Jumlah Belanja Kotor	767.608.000,00	49.945.000,00	1.436,91
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	767.608.000,00	49.945.000,00	1.436,91

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp626.224,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	626.224,00
Jumlah	0,00	626.224,00

C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-3.131,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp485.404.832,00 dan Rp339.278.093,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Barang Konsumsi	485.404.832,00	339.278.093,00
Jumlah	485.404.832,00	339.278.093,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp10.675.417.000,00 dan Rp10.675.417.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp9.656.781.603,00 dan Rp8.161.119.773,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	8.161.119.773,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	1.418.645.000,00
Transfer Masuk	39.244.000,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	15.800.000,00
Pengembangan Nilai Aset	25.000.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-3.027.170,00
Saldo per 31 Desember 2020	9.656.781.603,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-6.844.955.566,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	2.811.826.037,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

Pembelian :

1. Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 2 Unit
2. Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 8 Unit

3. Alat Laboratorium berupa Mikroskop 1 Unit, PH Meter 1 Unit, Colony Counter 1 Unit, Mikropipet 4 Unit, Refrigerator 2 Unit.
4. Pengadaan Meubelair berupa Lemari Arsip 1 Unit, Lemari Besi 1 Unit, Meja Kerja 4 Unit, Kursi Besi 4 Unit.
5. Perangkat Pengolah Data berupa Laptop 4 Unit, PC Komputer 5 Set,
6. Alat Komunikasi Operasional Lapangan 4 Unit
7. Fasilitas Kantor Lainnya berupa AC sebanyak 3 Unit, TV 4 Unit.

Transfer Masuk

1. Alat Pengolah Data berupa Laptop sebanyak 2 Unit dari BBKP Tanjung Priuk

Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP

1. Sumur Bor Wilker Sanana

Pengembangan Nilai Aset

1. Rekondisi Kendaraan Dinas Roda 4 berupa Mobil Avanza Silver dengan DG 1125 WP

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp18.451.897.060,00 dan Rp17.684.289.060,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	17.684.289.060,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Langsung	417.838.000,00
Pengembangan Nilai Aset	349.770.000,00
Saldo per 31 Desember 2020	18.451.897.060,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-1.318.259.302,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	17.133.637.758,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Pemasangan Paving Blok Facei
2. Rehab Gedung Kantor Wilker Tobelo
3. Pembangunan Pagar Kantor Wilker Sanana
4. Pembangunan Gudang IKH
5. Rehab Gedung Toloko

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp200.652.000,00 dan Rp200.652.000,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp18.900.000,00 dan Rp18.900.000,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-8.218.049.258,00 dan Rp-6.771.034.469,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	9.656.781.603,00	-6.844.955.566,00	2.811.826.037,00
2.	Gedung dan Bangunan	18.451.897.060,00	-1.318.259.302,00	17.133.637.758,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	200.652.000,00	-54.834.390,00	145.817.610,00
4.	Aset Tetap Lainnya	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00
Akumulasi Penyusutan		28.328.230.663,00	-8.218.049.258,00	20.110.181.405,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp30.211.804,00 dan Rp54.909.500,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0,00	25.626.000,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	30.211.804,00	29.283.500,00
Jumlah	30.211.804,00	54.909.500,00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp31.240.791.433,00 dan Rp30.254.335.050,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp392.655.454,00 dan Rp381.264.353,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	6.641.580,00	-100,00
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	346.345.454,00	338.352.773,00	2,36
Pendapatan Jasa Lainnya	46.310.000,00	36.270.000,00	27,68
Jumlah	392.655.454,00	381.264.353,00	2,99

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.424.109.020,00 dan Rp3.465.369.386,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.578.000.160,00	1.600.266.900,00	-1,39
Beban Pembulatan Gaji PNS	28.457,00	29.933,00	-4,93
Beban Tunj. Anak PNS	35.218.617,00	33.166.633,00	6,19
Beban Tunj. Beras PNS	93.550.600,00	94.290.840,00	-0,79
Beban Tunj. Fungsional PNS	165.330.000,00	142.680.000,00	15,87
Beban Tunj. PPh PNS	777.900,00	771.350,00	0,85
Beban Tunj. Struktural PNS	29.890.000,00	30.870.000,00	-3,17

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	109.305.386,00	109.564.730,00	-0,24
Beban Tunjangan Umum PNS	31.709.900,00	46.440.000,00	-31,72
Beban Uang Lembur	1.094.171.000,00	1.095.273.000,00	-0,10
Beban Uang Makan PNS	286.127.000,00	312.016.000,00	-8,30
Jumlah	3.424.109.020,00	3.465.369.386,00	-1,19

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp635.842.001,00 dan Rp556.770.891,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	635.842.001,00	556.770.891,00	14,20
Jumlah	635.842.001,00	556.770.891,00	14,20

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.154.345.604,00 dan Rp2.814.375.500,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Bahan	462.538.750,00	385.324.000,00	20,04
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	167.680.000,00	156.720.000,00	6,99

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Honor Output Kegiatan	104.640.000,00	104.640.000,00	0,00
Beban Jasa Lainnya	20.590.000,00	96.015.000,00	-78,56
Beban Jasa Profesi	47.000.000,00	16.800.000,00	179,76
Beban Keperluan Perkantoran	1.629.728.000,00	1.385.373.900,00	17,64
Beban Langganan Air	58.667.500,00	61.313.750,00	-4,32
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	46.987.950,00	31.996.250,00	46,85
Beban Langganan Listrik	335.259.154,00	311.220.450,00	7,72
Beban Langganan Telepon	7.734.250,00	8.320.050,00	-7,04
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	211.200.000,00	156.815.850,00	34,68
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.920.000,00	17.996.250,00	-72,66
Beban Sewa	57.400.000,00	81.840.000,00	-29,86
Jumlah	3.154.345.604,00	2.814.375.500,00	12,08

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp914.339.550,00 dan Rp719.297.050,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	393.150.000,00	252.390.000,00	55,77
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	521.189.550,00	466.907.050,00	11,63
Jumlah	914.339.550,00	719.297.050,00	27,12

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.888.066.150,00 dan Rp1.301.743.259,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi

untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	905.229.700,00	600.203.450,00	50,82
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.620.000,00	56.750.000,00	-44,28
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.000.000,00	46.027.400,00	-34,82
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	526.981.450,00	504.621.109,00	4,43
Beban Perjalanan Tetap	394.235.000,00	94.141.300,00	318,77
Jumlah	1.888.066.150,00	1.301.743.259,00	45,04

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.442.481.695,00 dan Rp1.394.934.566,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	402.348.591,00	385.319.722,00	4,42
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	7.947.500,00	7.947.500,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	3.606.288,00	3.606.288,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	1.159.979,00	-100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.028.579.316,00	996.901.077,00	3,18
Jumlah	1.442.481.695,00	1.394.934.566,00	3,41

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-3.131,00 dan Rp-18.547,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNPB	-3.131,00	-18.547,00	-83,12
Jumlah	-3.131,00	-18.547,00	-83,12

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-32.761.960,00	-35.725.700,00	-8,30
Beban Persediaan Rusak/Usang	0,00	-4.997.647,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	194.632.700,00	76.210.525,00	155,39
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	66.400.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	6.191.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
Jumlah	168.061.740,00	101.887.178,00	64,95

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp30.254.335.050,00 dan Rp30.743.842.119,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-10.898.463.695,00 dan Rp-9.769.320.574,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp372.406,00 dan Rp0,00.

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp372.406,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	372.406,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	3.027.170,00
Pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	3.027.170,00
Peralatan dan Mesin	-3.027.170,00
Jumlah	372.406,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp11.884.547.672,00 dan Rp9.279.813.505,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua

atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Ditagihkan ke Entitas Lain	12.233.043.020,00
Diterima dari Entitas Lain	-402.499.848,00
Transfer Masuk	54.004.500,00
Jumlah	11.884.547.672,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2020 saldo DDEL adalah sebesar Rp-402.499.848,00 sedangkan DKEL sebesar Rp12.233.043.020,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp54.004.500,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2020.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	018120100412126000KD	39.244.000,00
2.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018120100412126000KD	-4.905.500,00
3.	Barang Konsumsi	018120199412110000KP	19.666.000,00
Jumlah			54.004.500,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp31.240.791.433,00 dan Rp30.254.335.050,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang Kepada Pihak Ketiga adalah berupa Langganan Jasa Listrik, Langganan Jasa Telepon dan Langganan Jasa Air bulan Desember 2020 yang di bayarkan di bulan Januari 2021.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Struktur Organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate adalah sebagai berikut :

Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Yusup Patiroy, MM
Kepala Subbag TU / PPSPM	: Simon Soli, S.Pt
Kepala Seksi KH / PPK	: drh. Setyawan Pramularsi
Kepala Seksi KT	: Khori Arianti, S.Si
Bendahara Pengeluaran	: Mursyalim
Bendahara Penerimaan	: Rapidah

Sampai dengan 31 Desember 2020 Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate telah melakukan Revisi Anggaran berupa Revisi DIPA sebanyak 5 Kali dan Revisi POK sebanyak 1 kali dengan rincian sebagai berikut :

- DIPA Revisi I Tanggal 27 April 2020
- DIPA Revisi II Tanggal 19 Juni 2020
- DIPA Revisi III Tanggal 31 Agustus 2020
- DIPA Revisi IV Tanggal 25 November 2020
- DIPA Revisi V Tanggal 02 Desember 2020 (Revisi POK)
- DIPA Revisi VI Tanggal 17 Desember 2020